

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan ke semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disatu sisi perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi disisi lain dapat membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat dan sebagai konsekuensinya kehidupan manusia itu akan semakin terpuruk. Agar bangsa kita dalam era globalisasi ini mampu berperan dalam persaingan, maka sebagai bangsa kita perlu secara bersama-sama dan serius untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah dan terus berupaya mewujudkannya melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui manajemen berbasis sekolah, pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya secara terus menerus dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pemerintah membuat serangkaian kebijakan dengan mengembangkan kualitas manusia Indonesia sedini mungkin secara terarah, terpadu, menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan kreatif agar generasi muda dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Tetapi kelihatannya sampai saat ini kita belum bisa menciptakan suatu format pendidikan yang mencerdaskan sumber daya manusia sekaligus suatu sistem pendidikan yang bisa menanamkan konsep-konsep pencerahan.

⊗ Dengan demikian berarti problematika pendidikan nasional di negara kita sampai saat ini masih sangat pelik dari segi peningkatan kualitas. Pemerintahpun sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus serius memformat dan merencanakan sistem pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Karena sesungguhnya, disadari atau tidak bahwa pendidikan yang kita hadapi dewasa ini masih carut-marut. Hal ini terlihat dari rendahnya mutu pendidikan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah.

Tetapi sebagai bangsa yang siap untuk bersaing, kita tidak akan pernah putus asa karena masih banyak cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti meningkatkan kesejahteraan dan kualifikasi pendidikan guru, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada tingkat satuan pendidikan, bahwa peran seorang kepala sekolah sangat dituntut agar mampu menjadi kepala sekolah profesional dalam menjalankan tugasnya, mengelola sekolah secara efektif.

Manajemen kepala sekolah, perencanaan yang jelas, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang administrasi, bidang sarana prasarana dan bidang keuangan, bidang ketenagaan, termasuk analisis swot dalam menentukan visi, misi dan tujuan sekolah serta ketentuan-ketentuan dalam melaksanakannya harus jelas agar setiap warga sekolah dapat berbuat lebih terarah dan terkoordinir, supaya semua hal tersebut dapat tercipta diawali dari perencanaan sekolah.

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah wajib membuat perencanaan sekolah.

Perencanaan sekolah wajib dibuat oleh semua sekolah, baik yang termasuk kelompok rintisan kategori mandiri, potensial, nasional maupun internasional. Perencanaan sekolah dapat merupakan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Diharapkan, semua jenis kelompok sekolah menggunakan format perencanaan yang sama. Perbedaannya terletak pada isi, kedalaman, dan luasan atau cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat sekitarnya.

Bahwa sekolah yang merupakan sebuah sistem dalam peningkatan sumber daya manusia perlu dikelola secara bersama oleh para warga sekolah dan seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*) dalam upaya perbaikan kualitas sekolah. Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pembinaan SMA berinisiatif mengembangkan kriteria untuk menetapkan SMA kategori mandiri. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut rintisan sekolah kategori mandiri telah dilaksanakan di beberapa sekolah.

Dalam pelaksanaan program rintisan sekolah kategori mandiri, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada sekolah untuk memandirikan, memberdayakan, mendorong sekolah dan para *stakeholders* untuk melakukan kerja sama demi kemajuan sekolah. Pada tahun pelajaran 2007/2008 Direktorat Pembinaan SMA memprogramkan rintisan sekolah kategori mandiri di 440 SMA yang tersebar di 32 provinsi. Tujuan dari rintisan sekolah kategori mandiri adalah memberikan bimbingan dan pendampingan pada sekolah agar mencapai kategori mandiri, sebagai model sekolah kategori mandiri yang menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui kegiatan rintisan ini diharapkan dapat diperoleh bentuk nyata dari sekolah kategori mandiri yang dapat memenuhi atau hampir memenuhi delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Rintisan sekolah kategori

mandiri diharapkan akan menjadi sekolah kategori mandiri yaitu sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, mampu memberdayakan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk memenuhi sekolah kategori mandiri ada beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh rintisan sekolah kategori mandiri dalam kurun waktu tiga tahun yaitu dukungan internal dan eksternal.

Yang termasuk dukungan internal ialah: Kinerja sekolah, kurikulum, ketersediaan panduan pelaksanaan, kesiapan sekolah, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas. Kinerja sekolah dengan syarat; terakreditasi A, rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00., persentase kelulusan UN $\geq 90\%$ untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir $>$ dari daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang dicapai, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orangtua.

Rintisan sekolah kategori mandiri wajib memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum sekolah kategori mandiri, beban belajar dinyatakan dengan sistim kredit semester. Ketersediaan panduan pelaksanaan; Memiliki pedoman pembelajaran, pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, panduan menjajaki potensi peserta didik, dan memiliki pedoman penilaian. Kemudian sekolah menyatakan ingin melaksanakan sistem kredit semester, persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS $\geq 90\%$, pernyataan staf administrasi akademik bersedia

melaksanakan SKS, kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer. Berikutnya adalah persentase guru memenuhi kualifikasi akademik $\geq 75\%$, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90%), rasio guru dan siswa 1:20, jumlah tenaga administrasi akademik sesuai ketentuan, guru bimbingan konseling/karir. Ketersediaan fasilitas; ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, bimbingan, unit kesehatan, tempat olah raga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium bahasa, teknologi informasi/komputer, fisika, kimia, biologi, multimedia, IPS, perpustakaan memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran dan dikelola, layanan bimbingan karir.

Sementara dukungan eksternal termasuk dukungan dari komite sekolah, persentase orangtua yang menyatakan bersedia putranya mengikuti pembelajaran dengan SKS $\geq 60\%$, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis (kebijakan dan fasilitas/pembiayaan), dukungan tenaga pendamping/nara sumber dalam keseluruhan proses pengembangan dan pelaksanaan SKM.

Dalam SKM dilaksanakan sistem kredit semester artinya siswa dapat menyelesaikan studi selama 5 semester dan bisa lebih dari 6 semester. Standar kompetensi dan kompetensi dasar disusun menjadi satuan kredit semester, yaitu 120 SKS dengan mata pelajaran: wajib, pokok dan pilihan. Beban belajar siswa dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS), yaitu 16 sampai 28 SKS per semester. Kecepatan belajar normal adalah 20 SKS per semester. Satu SKS untuk mata pelajaran teori terdiri atas: 45 menit tatap muka 25 menit penugasan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri tidak terstruktur. Sementara mata pelajaran pilihan ditawarkan mulai semester 3. Semester 1 dan 2 sebanyak

20 SKS, Semester 3 dan seterusnya bisa 16 SKS sampai 28 SKS sesuai dengan prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya. Dimungkinkan siswa lulus kurang dari 6 (enam) semester. Pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi, minat, dan kecepatan belajar siswa melalui bimbingan dari penasehat akademik siswa.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Oleh karena itu siswa didorong untuk dapat belajar secara mandiri. Dalam pembelajaran sistem siswa pindah ruang kelas (moving class), diperlukan kelas mata pelajaran. Guru menyediakan jadwal untuk konsultasi mata pelajaran jadwal pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan perpustakaan. Penasehat akademik mendeteksi potensi siswa, bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar. Ada program remedi sepanjang semester (tidak ada batasan frekuensi pelaksanaan remedi dalam satu semester sehingga diperlukan perangkat pendukung untuk pelaksanaan remedi antara lain dalam bentuk modul pembelajaran mandiri yang disiapkan oleh guru).

Bentuk penilaian: tugas-tugas, ujian midsemester dan ujian semester. Penilaian menggunakan acuan kriteria dengan kategori A, B, C, dan D. Konversi skor menjadi grade, dan konversi grade menjadi skala 4. Lulus minimum mencapai nilai C. Syarat lulus indeks prestasi minimum 2,00. Administrasi Akademik: Setiap siswa di bawah bimbingan penasehat akademik membuat rencana studi, bisa direvisi atas dasar prestasi yang dicapai siswa, administrasi data prestasi siswa, mata pelajaran pilihan ditawarkan setelah semester 3.

Berkaitan dengan rintisan sekolah kategori mandiri, bahwa diantara 440 SMA bahwa SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar merupakan satu-satunya SMA Negeri maupun swasta di Kabupaten Simalungun yang menjadi rintisan sekolah kategori mandiri untuk tahun pelajaran 2007/2008. Rintisan sekolah

kategori mandiri adalah hal yang baru dan sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti secara mendalam pada sekolah tersebut khususnya sejak dilaksanakannya rintisan sekolah kategori mandiri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi perencanaan rintisan sekolah kategori mandiri di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perencanaan pengelolaan rintisan SKM?
2. Bagaimana implementasi perencanaan pembelajaran rintisan SKM?
3. Bagaimana implementasi perencanaan sumber daya rintisan SKM?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Dolok Batu

Nanggar tentang:

1. Implementasi perencanaan pengelolaan rintisan SKM.
2. Implementasi perencanaan pembelajaran rintisan SKM.
3. Implementasi perencanaan sumber daya rintisan SKM.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi:

1. Kepala SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar untuk membuat standar sekolah kategori mandiri yang lebih baik.
2. Tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Para yang berkepentingan dan yang peduli pendidikan (*stakeholders*).
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Peningkatan wawasan bagi peneliti untuk lebih meningkatkan pengetahuannya khususnya dalam bidang perencanaan pendidikan.
6. Para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.